

Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Transparansi Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Lathifah Aini¹, Citra Wulandari Manik², Hilikia Natasya Br Ginting³, Armin Rahmansyah Nasution⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: ainilathifah854@gmail.com¹, citrawulan289@gmail.com², hilkianatasyabrginting@gmail.com³, armin@unimed.ac.id⁴

Article History:

Received: 25 November 2025

Revised: 26 Februari 2026

Accepted: 12 Maret 2026

Keywords: Kepercayaan Publik, Transparansi Kebijakan, Pemerintah Indonesia

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan pemerintah di Indonesia menurun, serta bagaimana transparansi dan komunikasi publik membentuk persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis literatur dari berbagai sumber akademik nasional dan internasional yang berkaitan dengan kepercayaan publik, tata kelola pemerintahan, dan dinamika komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat adalah ketidakkonsistenan informasi pemerintah, peningkatan disinformasi digital, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap keterbukaan. Penurunan kepercayaan ini berdampak pada penurunan penerimaan kebijakan, penurunan partisipasi publik, dan peningkatan kerentanan terhadap narasi alternatif di dunia digital. Dalam konteks tata kelola pemerintahan kontemporer, penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan transparansi, konsistensi komunikasi, dan strategi informasi yang fleksibel sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi perhatian global yang semakin serius. Studi lintas benua oleh Valgarðsson et al. (2025) menunjukkan bahwa berbagai negara di Eropa dan Amerika Utara mengalami krisis kepercayaan institusional yang berakar pada ketidakpuasan publik terhadap transparansi dan konsistensi kebijakan sejak 1958 hingga 2019. OECD (2017) juga mencatat bahwa negara-negara maju menghadapi penurunan kepercayaan akibat melemahnya kredibilitas informasi publik, meningkatnya jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta persepsi ketidakpastian setelah krisis ekonomi global.

Fenomena serupa muncul di kawasan Asia, di mana meningkatnya disinformasi digital dan komunikasi publik yang belum optimal menurunkan keyakinan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Suriadi (2025) menyebutkan bahwa arus informasi yang tidak akurat di ruang digital memengaruhi persepsi publik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. Temuan Public

Health Ontario (2023) juga menunjukkan bahwa kurangnya kejelasan komunikasi risiko dan kebijakan di berbagai negara Asia membuat masyarakat lebih skeptis terhadap tindakan pemerintah, terutama dalam situasi krisis sosial dan kesehatan.

Di tingkat ASEAN, tantangan kepercayaan publik semakin dipengaruhi oleh kompleksitas tata kelola, ketidakselarasan kebijakan, serta masih ditemukannya praktik-praktik yang dinilai kurang akuntabel. OECD (2017) menguraikan bahwa negara berkembang di Asia Tenggara menghadapi tingkat kepercayaan publik yang fluktuatif karena kebijakan fiskal dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya transparan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Rusliandy (2024) menegaskan bahwa ketidakoptimalan implementasi kebijakan transparansi sering menimbulkan paradoks, sehingga meningkatkan keraguan masyarakat terhadap kinerja pejabat publik.

Di Indonesia, penurunan kepercayaan publik semakin terlihat melalui berbagai fenomena sosial dan politik. Rosidah et al. (2025) menemukan bahwa sejumlah kasus kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintah berdampak sistemik terhadap legitimasi negara. Sementara itu, Irhamdhika et al. (2025) menunjukkan bahwa maraknya fenomena “kabur aja dulu”, viralnya kampanye digital, serta munculnya gelombang kritik publik mencerminkan meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap isu transparansi pemerintah. Dinamika ini diperkuat oleh Putra & Lewoleba (2024), yang mencatat bahwa rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum memengaruhi persepsi publik terhadap kapasitas pemerintah dalam menjaga akuntabilitas. Selain itu, demonstrasi besar-besaran yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memberi isyarat bahwa publik menuntut penjelasan kebijakan yang lebih jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sejalan dengan penekanan OECD (2017) dan Siahay (2023) mengenai pentingnya tata kelola transparan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan publik di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh tantangan birokrasi dan komunikasi pemerintah, tetapi juga oleh dinamika sosial-politik, arus disinformasi digital, serta ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam apa saja faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan pemerintah, sekaligus memahami bagaimana transparansi serta komunikasi publik berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah. Tidak hanya itu, perlu dianalisis pula bagaimana penurunan kepercayaan publik berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan, serta bagaimana dinamika digital dan disinformasi mempercepat proses terbentuknya ketidakpercayaan publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan kepercayaan publik dalam konteks tata kelola modern serta kontribusi transparansi dalam memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.

LANDASAN TEORI

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

1. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat bahwa pemerintah memiliki integritas, kemampuan, dan niat baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut OECD (2017), dua faktor utama membentuk kepercayaan publik: kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan layanan yang efektif serta prinsip integritas pemerintah seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran.

Valgarðsson et al. (2025) menemukan bahwa di seluruh dunia, penurunan kepercayaan publik telah menjadi tren umum sejak 1958. Hal ini disebabkan oleh krisis politik, skandal

pejabat publik, dan meningkatnya keyakinan bahwa kebijakan tidak transparan. Menurut penelitian tersebut, kepercayaan publik berfungsi sebagai modal sosial dan merupakan syarat untuk legitimasi demokratis dalam penyusunan kebijakan. Dalam dunia digital, Suriadi (2025) mengatakan bahwa disinformasi semakin meningkat yang mempercepat kehancuran kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Kepercayaan publik dalam administrasi negara berada di persimpangan antara hukum, manajemen, dan politik, menurut Rosenbloom et al. (2015). Dengan kata lain, kualitas layanan tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat, tetapi juga seberapa baik pemerintah mematuhi prinsip etika publik dan tanggung jawab hukum. Akibatnya, kepercayaan publik adalah hasil dari kerja sama yang baik antara integritas birokrasi, akuntabilitas hukum, dan kualitas kebijakan.

2. Transparansi Pemerintah

Transparansi adalah bagian penting dari pemerintahan yang baik karena memungkinkan publik untuk mengetahui tentang proses kebijakan, penggunaan sumber daya, dan bagaimana lembaga negara bekerja. Menurut Dwiyanto (2024), transparansi administrasi publik berarti membuka proses, keputusan, dan informasi pemerintah sehingga masyarakat dapat melihat dan menilainya. Transparansi mencakup tidak hanya keterbukaan data, tetapi juga kualitas informasi yang diberikan dan cara pemerintah memastikan keterbukaan.

Rosenbloom et al. (2015) menyatakan bahwa transparansi terkait erat dengan prinsip responsifitas dan tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat divalidasi. Mereka berpendapat bahwa transparansi adalah cara kontrol demokratis untuk membatasi kekuasaan dan mencegah pemerintah menyalahgunakan wewenang mereka.

Rusliandy (2024) menunjukkan secara empiris bahwa ketidakjelasan kebijakan publik meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap korupsi dan kecurigaan terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah. Rosidah et al. (2025) menemukan bahwa ketidakjelasan dalam pengendalian pelanggaran kecurangan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Siahay (2023) transparansi yang efektif menghasilkan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, teori transparansi menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah komponen struktural yang membangun legitimasi pemerintah dan menciptakan kepercayaan publik dalam administrasi modern.

3. Krisis Kepercayaan Publik

Krisis kepercayaan publik merupakan kondisi ketika masyarakat mulai meragukan bahwa pemerintah bertindak sesuai kepentingan umum dan menjalankan fungsi pelayanan secara konsisten. Valgarðsson et al. (2025) menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi secara global akibat meningkatnya ketidakpastian politik, skandal pejabat, serta rendahnya transparansi dalam proses kebijakan. Faktor-faktor tersebut menciptakan persepsi bahwa institusi pemerintah tidak sepenuhnya kredibel atau mampu menjaga integritasnya, sehingga kepercayaan publik mengalami penurunan secara bertahap.

Dalam konteks Indonesia, Dwiyanto (2024) menjelaskan bahwa krisis kepercayaan publik di Indonesia diperburuk oleh kelembagaan birokrasi yang lemah, praktik administrasi yang tertutup, budaya organisasi yang tidak responsif, dan kasus penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara sistemik ketika mereka tidak melihat proses pemerintahan yang bersih dan jelas.

Rosenbloom et al. (2015) menyatakan bahwa ketika pemerintah tidak mampu mengimbangi manajemen publik yang efektif, akuntabilitas hukum, dan proses politik representatif, masyarakat menilai pemerintah tidak mampu menunjukkan kredibilitas dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Akibatnya, krisis kepercayaan publik terjadi.

Di tingkat nasional, Putra & Lewoleba (2024) menemukan bahwa ketidakjelasan penegakan hukum memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rosidah et al. (2025) menemukan bahwa kecurangan struktural meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah tidak mampu mempertahankan integritasnya. Hal ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik bukan hanya akibat dari kegagalan komunikasi; itu juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti integritas birokrasi, tanggung jawab hukum, dan pemerintahan tidak diterapkan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah mengenai penurunan kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan pemerintah. Metode ini dipilih karena topik penelitian bersifat konseptual dan membutuhkan pemahaman menyeluruh dari perspektif teori kepercayaan publik, transparansi, governance, serta dinamika komunikasi publik. Data diperoleh dari buku akademik, jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga internasional, serta review ilmiah lain yang kredibel. Analisis dilakukan melalui content analysis, yaitu membaca, menginterpretasikan, dan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Proses analisis mencakup reduksi data, kategorisasi tematik, perbandingan literatur, dan sintesis kesimpulan, sementara kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber lintas level (internasional, regional, dan nasional). Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara transparansi kebijakan dan dinamika kepercayaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan pemerintah Indonesia

Penurunan kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan pemerintah di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan, dinamika sosial-politik, hingga perubahan lanskap informasi digital. Kajian literatur menunjukkan bahwa selain faktor struktural seperti kapasitas birokrasi dan keterbukaan institusi, konteks empiris Indonesia memperlihatkan berbagai peristiwa nasional yang mempercepat terbentuknya persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Fenomena viral seperti “kabur aja dulu”, gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat dalam polemik kebijakan nasional, hingga kontroversi pengambilan keputusan publik menunjukkan bahwa problem kepercayaan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga tercermin jelas dalam praktik sosial-politik.

- a) Transparansi sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

Transparansi merupakan pilar utama pembentuk kepercayaan publik karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memahami proses, alasan, dan tujuan suatu kebijakan. OECD (2017) menegaskan bahwa semakin jelas informasi yang disampaikan, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam konteks

Indonesia, Rusliandy (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pemerintah daerah mampu meningkatkan persepsi publik terhadap integritas dan kejelasan kebijakan, sementara Dwiyanto (2024) menekankan bahwa transparansi tidak hanya terkait penyampaian informasi, tetapi juga pemberian akses terhadap proses kebijakan sehingga publik dapat menilai bahwa keputusan pemerintah dibuat secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Komunikasi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik

Di era digital, komunikasi publik memiliki peran penting karena masyarakat memperoleh informasi melalui berbagai platform daring. Valgarðsson et al. (2025) menjelaskan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menyampaikan informasi secara akurat dan mudah diakses dalam situasi perubahan sosial yang cepat. Suriadi (2025) menegaskan bahwa komunikasi publik yang jelas, cepat, dan konsisten membantu mengurangi dampak disinformasi digital, sehingga publik dapat merasa lebih yakin terhadap kebenaran informasi resmi yang disampaikan dan tetap menilai pemerintah sebagai sumber informasi yang kredibel.

c) Hubungan Sinergis antara Transparansi dan Komunikasi Publik

Transparansi dan komunikasi publik bekerja secara sinergis dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena keterbukaan informasi perlu disampaikan melalui strategi komunikasi yang efektif agar dapat dipahami secara luas. Dwiyanto (2024) menyebutkan bahwa transparansi tanpa komunikasi yang baik tidak cukup membentuk kepercayaan publik, sementara komunikasi yang efektif akan memperkuat kesan bahwa pemerintah menjalankan fungsi pelayanan secara terbuka dan responsif. Ketika informasi yang terbuka mampu dijelaskan dengan jelas melalui komunikasi publik, masyarakat cenderung menilai bahwa pemerintah bekerja sesuai kepentingan publik, sehingga tingkat kepercayaan terhadap kebijakan dan institusi negara meningkat.

2. Dampak Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Indonesia

Penurunan kepercayaan publik berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan pemerintah karena kepercayaan merupakan modal sosial yang menentukan penerimaan masyarakat, stabilitas kebijakan, serta tingkat kepatuhan publik. Dalam konteks Indonesia, berbagai peristiwa aktual seperti demonstrasi besar menolak sejumlah kebijakan nasional, viralnya fenomena “kabur aja dulu”, hingga maraknya disinformasi digital menunjukkan bahwa krisis kepercayaan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata mempengaruhi cara kebijakan dibentuk, disosialisasikan, dan dijalankan. Berdasarkan telaah literatur dan fenomena empiris, terdapat tiga dampak besar penurunan kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan di Indonesia.

a) Menurunnya Penerimaan dan Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan

OECD (2017) menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan informasi dan tingkat kredibilitas pemerintah. Ketika kepercayaan menurun, masyarakat cenderung meragukan tujuan kebijakan, sehingga respons publik menjadi lebih lambat dan skeptis. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam berbagai demonstrasi besar, misalnya aksi mahasiswa dan masyarakat terkait revisi undang-undang tertentu, yang tidak hanya mencerminkan penolakan substansi kebijakan, tetapi juga ketidakpercayaan terhadap transparansi proses pengambilan keputusan. Public Health Ontario (2023) menunjukkan bahwa ketidakpastian

informasi memperpanjang waktu adaptasi masyarakat terhadap kebijakan, sehingga implementasi menjadi tidak optimal.

- b) **Melemahnya Partisipasi Publik dan Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat**
Kepercayaan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk terlibat dalam kebijakan secara aktif. Dwiyanto (2024) menjelaskan bahwa partisipasi muncul ketika publik yakin pemerintah bertindak secara terbuka dan responsif. Ketika kepercayaan menurun, partisipasi publik merosot, baik dalam bentuk dukungan terhadap program pemerintah maupun keterlibatan dalam konsultasi kebijakan. Contoh nyata terlihat ketika muncul fenomena kabur aja dulu, yang viral sebagai bentuk satir publik terhadap kapasitas pemerintah menjelaskan kebijakan secara transparan. Selain itu, menurut Siahay (2023) dan Rusliandy (2024) persepsi bahwa kebijakan tidak dibangun secara partisipatif mempersempit ruang kolaborasi, sehingga proses implementasi di tingkat pusat maupun daerah menjadi kurang efektif.

- c) **Meningkatnya Kerentanan terhadap Disinformasi dan Turunnya Legitimasi Kebijakan**

Ketika kepercayaan publik melemah, masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi alternatif, termasuk disinformasi digital. Suriadi (2025) menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan membuat publik lebih mengandalkan informasi viral di media sosial daripada penjelasan resmi pemerintah. Hal ini mempercepat polarisasi opini, memperkeruh pemahaman kebijakan, dan menghambat implementasi kebijakan di lapangan. Kasus-kasus seperti mobilisasi opini publik melalui tagar viral, misinformasi terkait kebijakan sosial, atau framing negatif terhadap keputusan publik menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan dapat tergerus dengan cepat. Valgarðsson et al. (2025) dan Rosenbloom et al. (2015) menegaskan bahwa legitimasi hanya dapat bertahan bila keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah berjalan baik; ketika keduanya dipersepsikan kurang, efektivitas kebijakan mengalami penurunan signifikan.

3. **Dinamika Kepercayaan Publik Dalam Konteks Digital Dan Disinformasi Di Indonesia**

Cara masyarakat menerima, menafsirkan, dan menilai informasi kebijakan telah sangat berubah sejak ruang digital berkembang. . Suriadi (2025) menyatakan bahwa kecepatan arus informasi dan tingkat disinformasi membuat publik mudah terpengaruh oleh pesan yang tidak jelas. Akibatnya, persepsi publik terhadap transparansi kebijakan sangat berubah-ubah. Fenomena "kabur saja dulu", yang menjadi viral dan menunjukkan reaksi spontan masyarakat terhadap komunikasi kebijakan yang dianggap tidak jelas, menimbulkan berbagai interpretasi di dunia digital. OECD (2017) juga menemukan bahwa ketidaksesuaian informasi di media digital dapat mengurangi kepercayaan publik, terutama dalam kasus di mana masyarakat sangat bergantung pada informasi cepat untuk memahami proses kebijakan.

Media sosial di Indonesia membentuk opini publik lebih cepat daripada komunikasi resmi pemerintah. Irhamdhika et al. (2025) menemukan bahwa framing digital, seperti tagar viral, potongan video singkat, atau komentar populer yang membentuk persepsi kolektif, seringkali memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan. Contoh nyata dapat ditemukan dalam banyak demonstrasi besar yang dipicu oleh gabungan disinformasi dan ketidakselarasan dalam komunikasi kebijakan; di sini, narasi publik berkembang lebih cepat daripada penjelasan resmi pemerintah. Menurut Public Health Ontario (2023), komunikasi kebijakan dalam situasi seperti itu harus konsisten, mudah dipahami, dan cepat agar tidak

kalah oleh informasi alternatif yang tersebar di media sosial. Ini karena disinformasi sering kali lebih menarik perhatian publik daripada klarifikasi resmi.

Secara keseluruhan, dinamika digital di Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat pemerintah menanggapi masalah dan seberapa baik komunikasi kebijakannya disampaikan. Penjelasan resmi dapat terlambat atau tidak disampaikan secara memadai, dan ini menunjukkan bahwa penguatan strategi komunikasi publik yang adaptif, responsif, dan trampil adalah penting.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan pemerintah di Indonesia dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan informasi, dinamika digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah. Transparansi dan komunikasi publik terbukti menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah. Ketika dua aspek tersebut tidak berjalan optimal, penerimaan kebijakan dan partisipasi publik cenderung melemah, sementara disinformasi semakin mudah memengaruhi opini masyarakat. Selain itu, dinamika komunikasi digital mempercepat perubahan persepsi sehingga pemerintah perlu lebih adaptif dan responsif. Secara keseluruhan, kepercayaan publik sangat bergantung pada kualitas tata kelola informasi dan konsistensi komunikasi pemerintah.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode empiris agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi publik. Pemerintah perlu memperkuat konsistensi komunikasi kebijakan, meningkatkan edukasi publik, serta mengoptimalkan kanal digital untuk mengurangi ruang disinformasi. Pembaca dan masyarakat diharapkan meningkatkan literasi informasi agar dapat menilai kebijakan secara lebih objektif dan mendukung terciptanya komunikasi publik yang sehat.

DAFTAR REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2024). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. UGM Press.
- Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Ariska, Y., Ningtyas, D. A., & Sari, A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburajadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 6(1), 7–15. <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663>
- OECD. (2017). *Trust and Public Policy How BETTER GOVERNANCE Can HELP REBUILD PUBLIC TRUST*.
- Public Health Ontario. (2023). *EVIDENCE BRIEF Risk Communication and Trust in Public Health during the COVID-19 Pandemic*.
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Rosidah, A., Ghassani, A., Arsita, D., Nisaa, M. K., & Artamevia, N. (2025). Dampak Sistemik Tindak Pidana Kecurangan Terhadap Kepercayaan Publik di Sektor Pemerintahan. *Lentera Ilmu*, 1(1), 167–176. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.35>
- Rusliandy, R. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN TRANSPARANSI TERHADAP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK DI PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal EL-RIYASAH*, 15(2), 89–

-
105. <https://doi.org/10.24014/jel.v15i2.33995>
- Siahay, A. Z. D. (2023). Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting. *JER: Journal Economic Resources*, 6(2), 423–430.
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1).
- Valgarðsson, V., Jennings, W., Stoker, G., Bunting, H., Devine, D., McKay, L., & Klassen, A. (2025). A Crisis of Political Trust? Global Trends in Institutional Trust from 1958 to 2019. *British Journal of Political Science*, 55(15), 1–23. <https://doi.org/10.1017/S0007123424000498>